

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	NAPITUPULU, MASTA DAHLIA (2021) ANALISIS IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA MELALUI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)	Pengembangan BUMDes untuk mewujudkan tujuan Program SDGs Desa	Pengembangan BUMDes sejak tahun 2019 dapat mewujudkan tercapainya tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan baik yakni tercapainya desa layak air bersih dan sanitasi, desa pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, serta kemitraan untuk pembangunan desa melalui tahapan komunikasi, pengelolaan sumber daya, sikap pelaksana (disposisi) dan struktur birokrasi dengan unit usaha seperti unit depot air minum, unit gas	Persamaan dalam penelitian ini yaitu ada pada pembahasan BUMDes dan SDGs sedangkan perbedaannya adalah dari Desa yang berbeda dan focus penelitiannya

			<p>elpiji, unit peternakan ayam broiler dan unit jasa perbankan Bri Link. Namun dalam pengembangannya masih terdapat kendala dalam kegiatan ini seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya anggaran biaya sehingga belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah desa harus lebih gencar melakukan pelatihan dan sosialisasi baik secara langsung maupun penggunaan media sosial untuk menarik perhatian pemuda dan masyarakat desa agar pemberdayaan masyarakat berdaya secara optimal</p>	
--	--	--	--	--

			sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan di masyarakat desa .	
2.	FARIHAH, Iklilah Nadiyah (2022) Implementasi Laporan Keberlanjutan Pada BUMDES Karya Mandiri Sebagai Perwujudan SDGs Desa	Mengetahui apakah laporan keberlanjutan bagi pemangku kepentingan penting sebagai pertanggung jawaban BUMDes.	Laporan keberlanjutan (sustainability report) BUMDes yang disesuaikan dengan GRI Standards dan topik material yang diungkapkan yaitu dampak operasional BUMDes terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.	Persamaannya yaitu menyangkut seputar BUMDes dan SDGs yang berfokus pada ekonomi desa. Perbedaannya ada pada Desa yang berbeda serta penyusunan tiap-tiap poin yang diteliti.
3.	Aprina Nugrahesthy Sulistyia Hapsari (2022) STRATEGI BUMDes “KITA” UNTUK PERCEPATAN PENERAPAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN	Melihat penerapan prinsip dan strategi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan keselarasan desa-SDGs dalam pengelolaan BUMDes khususnya dalam pemulihan ekonomi Indonesia	Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pada BUMDes yang baru berdiri, sehingga banyak hal yang dapat menjadi masukan bagi BUMDes “KITA” serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat dikaji kembali setelah BUMDes ini di tahap berkembang .	Persamaan yaitu penelitian terhadap BUMDes dan SDGs yang berfokus pada Pengelolaan keuangan. Perbedaan yaitu Desa yang dieliti, serta pengembangan BUMDes dalam mewujudkan SDGs dalam bidang ekonomi.

4.	<p>Roberta Zulfhi Surya (2019) ANALISA KESELARASAN SDGs DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA SERESAM DI DESA SERESAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU</p>	<p>Mengumpulkan data dan informasi sementara desk review untuk melakukan analisa keselarasan antara SDGs dengan program pembangunan desa .</p>	<p>Desa Seresam telah sukses mengimplementasikan tujuan mulia SDGs. untuk lebih meningkatkan pencapaian SDGs, perlu dilakukan integrasi dengan berbagai pihak melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran CSR perusahaan turut berperan serta dalam kegiatan Pembangunan Desa (termasuk program desa SDGs) meskipun program CSR telah diatur dalam Undang- undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam Program Pengabdian 	<p>Pesamaan dari hasil penelitian yang terfokus pada SDGs dengan program pembangunan desa. Sedangkan perbedaannya yaitu ada pada Desanya, juga hasil penelitian yang terkait BUMDes untuk mewujudkan SDGs pada Desa</p>
----	--	--	---	---

			Masyarakat	
5.	Novianty Djafri, Apriyanto A. J Pauweni, Syamsu Qamar Badu (2021) Peningkatan Pendapatan Perekonomian Kelompok UMKM Melalui Pemanfaatan, Peran dan Rencana Aksi Pelaksanaan SDGs Desa	Pendampingan Berkelanjutan Melalui Manajemen Pemanfaatan Peran SDGS Desa, dalam Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Perekonomian Kelompok UMKM Di Kawasan Pesisir	Pemberdayaan sinergitas Peningkatan Pendapatan Perekonomian dengan desa tanpa kemiskinan melalui Kelompok UMKM dikawasan pesisir; serta menemukan model Manajemen kepemimpinan Kepala Desa Kreatif; UMKM/Enterpr enurhip Berbasis SDGs.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan yang terfokus pada SDGs dan juga BUMDes. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu terfokus pada kelompok UMKM, dan perbedaan pada lokasi desa.
6.	Dewi Kirowai, Luffiyah Dwi Setia, (2018) Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Desa (Studi Kasus Desa Temboro Kecamatan Keras Kabupaten Magetan)	Mengetahui strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat .	Menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan serta memberikan dampak langsung terhadap ekonomi perdesaan dan budaya masyarakat .	Persamaan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada BUMDes sedangkan perbedaannya yaitu Pengembangan Desa mandiri melalui BUMDes dan tidak adanya program SDGs
7.	Niswaton Hasanah, (2019)	Strategi Pengembangan	Menunjukkan bahwa strategi	Persamaan pada penelitian

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	BUMDes	yang dilakukan oleh BUMDes telah berhasil dan memenuhi focus pencapaiannya	ini dengan peneliti terdahulu yaitu ada pada BUMDes. Sedangkan perbedaan yaitu peneliti terdahulu tidak menangkutpautkan SDGs pada penelitiannya.
---	--------	--	---

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Reinteving government

Reinventing Government (David Osborne dan Ted Gaebler, 1992) adalah suatu gagasan atau suatu konsep tentang mengkritisi juga memperbaiki terkait teori-teori klasik dan konsep-konsep untuk dapat mengoptimalisasi pelayanan atas publik birokrasi (Wijayanto et. al 2013:1169). Gagasan ini hadir sebagai bentuk respon atas buruknya pelayananan publik yang banyak terjadi di pemerintahan Amerika hingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah pada saat itu. Pemerintahan yang pertama kali memberikan respon terhadap berbagai realitas baru pada masa itu sebagian besar adalah pemerintahan daerah, karena merekalah yang pertama kali menemui jalan buntu.

Reinventing government merupakan cara birokrasi mengubah sistem atau pengaturan agar pelaksanaan pemeritahan dapat berjalan secara akuntabilitas, resposif, inovatif, professional, dan *entrepreneur*. *Entrepreneur* dimaksudkan agar pemerintah daerah yang telah diberikan otonomi memiliki semangat

kewirausahaan untuk lebih inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjawab tuntutan masyarakat di era globalisasi. Sehingga mewirausahakan birokrasi bukan berarti birokrasi melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melainkan memberdayakan institusi agar produktivitas dan efisiensi kerja dapat dioptimalkan .

Konsep *reinventing government* harus dikuasai oleh aparat birokrasi pemerintah daerah, pimpinan instansi/ dinas di daerah dan terutama Bupati/ Walikota. Osborne dan Gaebler (1992) dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector* mengemukakan sepuluh cara untuk membentuk birokrasi-wirausaha , yaitu:

1. Pemerintahan Katalis : Mengarahkan daripada mengayuh. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan-kebijakan strategis yang bersifat mengarahkan daripada dalam teknis pelayanan (pengayuh). Dimana dengan peran pemerintah yang mengarahkan akan membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan, sedangkan pengayuh membutuhkan orang yang memfokuskan pada satu misi dan melakukannya dengan baik .
2. Pemerintahan milik masyarakat : Memberi wewenang daripada melayani. Masyarakat sebagai pemilik pemerintahan harus dapat diberdayakan daripada terus-menerus dilayani. Pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk dapat mandiri dan inovatif dalam memenuhi kebutuhannya dalam pelayanan .

3. Pemerintahan yang kompetitif : menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Dengan adanya kompetisi maka diharapkan aparat pemerintahan memiliki semangat juang yang tinggi dalam bekerja, menghargai inovasi, dan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Pemerintah memberikan kesempatan dan kebebasan berkreasi dan berinovasi kepada unit-unit pemerintahan sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan misi. Oleh karenanya peraturan yang ada untuk ditaati, bukan sebagai penghambat .
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil : membiayai hasil, bukan masukan. Pemerintah lebih mementingkan hasil kinerja yang dicapai daripada faktor masukan (*input*) .
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah hendaknya menyadari tugasnya sebagai pelayan masyarakat bukan yang dilayani oleh masyarakat, sehingga pemerintah akan peka terhadap kebutuhan masyarakat dan berupaya memberikan pelayanan yang optimal .
7. Pemerintahan wirausaha : menghasilkan daripada membelanjakan. Pemerintah sebagai suatu badan usaha harus dapat mandiri dan meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, manajer/ pimpinan pemerintahan harus berpikir kreatif untuk mendapatkan

penghasilan(*entrepreneur*) dalam membiayai kebutuhan pelayanan public .

8. Pemerintahan antisipatif : mencegah daripada mengobati. Pemerintah harus memiliki perencanaan strategis dan memiliki daya antisipatif sehingga mampu mencegah daripada menanggulangi masalah. Pencegahan ini diharapkan dapat mengurangi resiko timbulnya masalah yang lebih kompleks .
9. Pemerintahan desentralisasi : dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Pimpinan organisasi pemerintahan harus dapat mengubah pola kerja hierarki menjadi pola kerja partisipasi dan kerja sama. Sehingga akan memberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghasilkan inovasi kerja serta lebih efektif dan efisien dalam proses pencapaian tujuan .
10. Pemerintahan berorientasi pasar : mendorong perubahan melalui pasar. Pemerintah harus memiliki strategi yang inovatif sebagai *entrepreneur* dan mampu menciptakan perubahan melalui pasar .

2.2.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global pada tiga dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Tujuan dan sasaran SDGs terintegrasi dan menyeluruh, bersifat global dan dapat diterapkan secara universal, memperhitungkan realitas nasional yang berbeda-beda kapasitas dan tingkat pembangunannya, serta menghormati setiap kebijakan dan prioritas

nasional setiap negara. Oleh karena itu, peran negara sangat penting dalam melakukan pendekatan dan menyusun strategi yang menyeluruh antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan karakteristik dan prioritas nasional (United Nations, 2015: 3, 14; Badan Pusat Statistik, 2016: 3; Panuluh & Fitri, 2016: 11) .

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyepakati Sustainable Development Goals dan berkomitmen melaksanakan ataupun mengimplementasikan dengan baik program Sustainable Development Goals (SDGs) ini. Berbagai kegiatan dan program telah di terapkan untuk menjadikan langkah-langkah strategis dalam mensukseskan Sustainable Development Goals (SDGs). Agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak dan daerah, Indonesia mengatur pada Keputusan Presiden 59 tahun 2017,4 target dan indikator SDGs selaras dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019), dari sebanyak 169 target yang ada di SDGs, sekitar 57 persen (96 target SDGs) telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Untuk menjamin implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) berjalan dengan baik di Indonesia, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals (SDGs) bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia .

- a. Mengenal SDGs: visi baru untuk pembangunan berkelanjutan Konsep SDGs merupakan hasil dari kegiatan konferensi di Rio de Janeiro yang dilakukan

oleh PBB pada tahun 2012 berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini diselenggarakan dengan maksud dapat mencapai tujuan bersama yakni mampu menjaga keseimbangan tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan meliputi lingkungan, sosial dan ekonomi.

Guna mencapai tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan tersebut SDGs mempunyai 5 asas utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan untuk mewujudkan tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa pengentasan kemiskinan, mencapai kesetaraan serta mengatasi perubahan iklim.

Indonesia memiliki tujuh belas arah pembangunan yang mereka tetapkan dan terdapat empat tujuan utama SDGs ini (Brodjonegoro, 2017). Pertama, mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan meningkatkan pertanian berkelanjutan. Ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif, menyeluruh dan layak untuk semua masyarakat. Keempat, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.

Ke-17 tujuan global dari SDGs tersebut diantaranya :

- 1) Tanpa kemiskinan. Seluruh dunia harus terbebas dari belenggu kemiskinan .

- 2) Tanpa kelaparan. Kelaparan tidak terjadi lagi, ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mempertahankan budidaya pertanian yang berkelanjutan .
- 3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai tanpa pandang usia serta mendorong kesejahteraan hidupnya .
- 4) Pendidikan berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan .
- 5) Kesetaraan gender. Mengikutsertakan kaum ibu dan perempuan dalam setiap kegiatan yang bermanfaat sehingga kesetaraan gender dapat tercapai .
- 6) Air bersih dan sanitasi. Memastikan semua orang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan .
- 7) Energi bersih dan terjangkau. Semua orang dapat mengakses sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern .
- 8) Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Perkembangan ekonomi semakin pesat dan lapangan kerja tersedia untuk semua orang sehingga mampu mendapatkan kehidupan yang layak .
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur. Industri dan infrastruktur berkembang pesat, berkualitas, penuh inovasi dan berkelanjutan .

- 10) Mengurangi kesenjangan. Mewujudkan kesetaraan di seluruh Negara di dunia .
- 11) Keberlanjutan kota dan komunitas. membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan serta berkelanjutan .
- 12) Konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Keberlangsungan konsumsi serta pola produksi terjamin .
- 13) Aksi terhadap iklim. Melakukan tindakan yang cepat dalam mengatasi perubahan iklim dan mengantisipasi dampaknya .
- 14) Kehidupan bawah laut. Menjaga kelestarian laut dan mempertahankan eksistensi sumber daya laut demi perkembangan pembangunan berkelanjutan .
- 15) Kehidupan di darat. Menjaga kelestarian ekosistem darat, mengelola dan memperhatikan kelestarian hutan, memulihkan degradasi tanah dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati .
- 16) Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Menciptakan perdamaian dalam masyarakat, akses keadilan tersedia bagi semua orang maupun lembaga tanpa pandang bulu, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh lapisan .
- 17) Menjalinkan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan. Memperkuat implementasi dan membangkitkan kembali kerjasama global demi mencapai pembangunan berkelanjutan.

b. Mengenal SDGs Desa

SDGs Desa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Dalam Perpres tersebut disebutkan ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Sementara SDGs Desa menambahkan satu tujuan lagi. Sehingga, SDGs Desa memiliki 18 tujuan pembangunan berkelanjutan desa.

- 1) Desa Tanpa Kemiskinan ; Tujuan ini menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan di desa mencapai 0 persen. Artinya, pada tahun 2030, tidak boleh ada penduduk miskin di desa. Untuk mencapai target tersebut, tentu banyak kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan bersama-sama, dalam rangka pencapaian tujuan Desa tanpa kemiskinan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, seperti, meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.
- 2) Desa tanpa kelaparan ; Pada tahun 2030, tujuan ini menargetkan tidak ada kelaparan di desa, juga desa mencapai kedaulatan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja
- 3) Desa sehat dan sejahtera ; Tujuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan warga desa yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan. Tujuan

ini menyaratkan tersedianya akses yang mudah terhadap layanan kesehatan bagi warga desa.

- 4) Pendidikan Desa Berkualitas ; Pembangunan berupaya meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin desa, menjamin akses warga desa terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh warga desa dari segala bentuk bencana. Untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin desa, maka target utama dari tujuan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa. Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) desa.
- 5) Keterlibatan Perempuan Desa ; Dengan tujuan ini, pemerintah desa dengan dukungan dari berbagai pihak menjadi garda terdepan dalam pengarusutamaan gender. Pada tahun 2030, Tujuan SDGs Desa adalah terciptanya kondisi yang menempatkan semua warga desa dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan.
- 6) Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi ; Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi problem di seluruh dunia. Karena itulah, pemenuhan atas kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan.

- 7) Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan ; Tujuan SDGs Desa ini memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. Capaian tujuan ini sampai tahun 2030 dapat diukur dengan beberapa indikator, di antaranya: konsumsi listrik rumah tangga di Desa mencapai minimal 1.200 Kwh; Rumah tangga di Desa menggunakan gas atau sampah kayu untuk memasak; penggunaan bauran energi terbarukan di desa.
- 8) Pertumbuhan ekonomi desa merata ; Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs Desa ini, di antaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan.
- 9) Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan ; untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, maka keandalan infrastruktur desa sangat menentukan. Mulai dari infrastruktur jalan desa, jalan poros desa, maupun infrastruktur lainnya, yang mendukung aktivitas ekonomi warga desa, seperti infrastruktur bidang pertanian, perikanan, serta sektor-sektor lainnya. Selain infrastruktur, SDGs Desa juga menekankan lahirnya inovasi di desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan publik, serta produk-produk unggulan desa. Oleh karena itu, SDGs Desa

menggunakan beberapa indikator keberhasilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun supra desa, di antaranya: kondisi jalan yang andal; dermaga/tambatan perahu; pertumbuhan industri di desa; serta kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

10) Desa tanpa kesenjangan ; Isu kesenjangan selalu menyertai aktivitas pembangunan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan telah menjadi isu global dan cenderung meningkat pada beberapa dekade terakhir, bahkan di negara-negara berkembang kesenjangan meningkat hingga 11%. SDGs Desa bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan tersebut pada tahun 2030. Untuk itulah, keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan koefisien Gini desa; tingkat kemiskinan di desa; status perkembangan desa; serta indeks kebebasan sipil di desa.

11) Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman ; Pemukiman adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, agar manusia dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Pemenuhan hak atas pemukiman menyaratkan pemukiman yang layak, bersih, aman, dan berkelanjutan. Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan beberapa target capaian kawasan permukiman yang bersih dan sehat, terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, serta terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa.

- 12) Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan ; Tujuan ini berkaitan dengan upaya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan harus mempertimbangkan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pemisahan pertumbuhan ekonomi dari penggunaan sumber daya dan degradasi lingkungan adalah salah satu tujuan SDGs Desa
- 13) Desa Tanggap Perubahan Iklim ; SDGs Desa ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan capaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan indeks resiko bencana di desa.
- 14) Desa Peduli Lingkungan Laut ; tujuan SDGs Desa ini adalah untuk melindungi pantai dan lautan. Untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan beberapa indikator berikut: kebijakan desa terkait perlindungan sumberdaya laut; terjadinya peningkatan penangkapan ikan secara wajar; serta tidak terjadinya illegal fishing.
- 15) Desa Peduli Lingkungan Darat ; Demi terpenuhinya kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan datang, serta demi melindungi margasatwa, maka SDGs Desa ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan

margasatwa. Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikator diantaranya kebijakan pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati; luas lahan terbuka hijau; serta jumlah satwa terancam punah.

- 16) Desa Damai Berkeadilan ; SDGs Desa salah satunya bertujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif. Oleh karena itu, beberapa upaya yang harus dilakukan Pemerintah Desa dan Supra Desa adalah mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan, dan menemukan solusi jangka panjang menghadapi konflik warga desa. Selama ini kejadian kejahatan di desa masih cukup tinggi.
- 17) Kemitraan untuk Pembangunan Desa ; SDGs Desa mensyaratkan adanya kemitraan desa yang baik dengan berbagai tersebut, termasuk juga kemitraan dengan desa lain, atau dengan kelurahan. Karena hanya dengan kemitraan/kerja sama itulah pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Oleh karena itu, desa harus dapat meredam ego demi mewujudkan SDGs Desa 2030.
- 18) Kelembagaan Desa Dinamis dan budaya desa adaptif. Menghargai keberagaman Bangsa Indonesia dalam Agama, budaya, bahasa dan adat istiadat serta menampung kearifan local masyarakat kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang

c. Pilar-pilar SDGs

Menurut Sachs dalam bukunya Armida Salsiah Alisjahbana, dkk konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memiliki keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang pesat harus diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata melalui terseleggaranya lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak .

Disamping itu, pertumbuhan ekonomi tersebut harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dengan tidak membuat udara menjadi tercemar atau menghabiskan sumberdaya alam. Terakhir, eksistensi dari pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan demi tercapainya sasaran-sasaran yang dikehendaki. Karena seperti yang kita ketahui bahwa fungsi-fungsi inti dalam kehidupan hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah, seperti regulasi, jaminan kesehatan nasional dan infrastruktur. Konsep utama tersebut melahirkan turunan yang bisa dimaknai sebagai pilar pertama dari SDGs yakni disebut dengan 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership*). Pilar 5P ini dapat dimaknai sebagai berikut, *People* :

Lahirnya SDGs ini bertujuan untuk menegaskan bahwa semua manusia harus terbebas dari belenggu kemiskinan, kelaparan, mendapatkan kedudukan yang setara serta mendapatkan hak untuk hidup secara bermartabat; *Planet*: SDGs berusaha untuk menjaga bumi dari dampak buruk akibat kegiatan manusia meliputi perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran sehingga kebutuhan masa depan masih dapat terpenuhi;

Prosperity: SDGs hadir untuk memastikan kesejahteraan hidup semua umat manusia, mampu mencukupi kebutuhannya serta dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan alam; *Peace*: tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial, begitupun sebaliknya, tidak ada perdamaian dan keamanan sosial tanpa pembangunan berkelanjutan; *Partnership*: kesuksesan pembangunan berkelanjutan hanya dapat diraih melalui kerja sama global yang kuat dengan tingginya asas solidaritas. Seperti yang diuraikan di atas, SDGs merupakan visi global bersama yang mewakili kepentingan semua pihak .

Sebagai tambahan, negara-negara yang hadir di dalam *the UN Sustainable Development Summit* sependapat bahwa SDGs adalah perjalanan bersama hingga 2030 dan berjanji bahwa tidak akan ada satu negara pun yang tertinggal. Inilah pilar kedua SDGs yang disebut dengan *no one is left behind*. Pilar kedua ini semakin memperlihatkan bahwa SDGs harus dipahami sebagai visi bersama, bukan visi ambisius yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja .

Target pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik merupakan pilar SDGs yang terakhir. SDGs yang telah disusun dengan 17 tujuan sangat memperhatikan aspek keterkaitan antar tujuan. Hal ini berbeda dengan MDGs yang kurang memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Dengan kata lain, usaha untuk meraih sebuah tujuan memiliki hubungan yang erat dengan usaha untuk meraih tujuan yang lainnya.

2.2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.3.1 Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Definisi BUMDes Menurut (Maryunani, 2008) : “BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”. Jadi BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba) .

Keberadaan BUMDes secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta untuk memperkuat perekonomian desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat dengan adanya BUMDes, desa diberikan hak penuh untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa intruksi dari pemerintah dan kelompok tertentu. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat desa dituntut untuk mandiri. Dalam hal ini untuk menopang sifat kemandirian dari pemerintah dan masyarakat desa maka diperlukan prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif dan emansipatif, transparansi, serta sustainable* agar BUMDes dapat dijalankan dengan baik dan optimal, selain itu harus didasarkan oleh kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak serta kemampuan setiap anggota untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi dan konsumen .

Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititik beratkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi sosial ekonomi BUMDes harus mampu berkompetensi ke luar desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi produktif maupun konsumtif dengan pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa, yakni hal ini mampu diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga yang lebih murah dan mudah didapatkan dan lebih menguntungkan, tetapi dalam hal ini BUMDes harus tetap memperhatikan

Efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan yang berlaku sebagai lembaga keuangan mikro. Menurut Purnomo (Purnomo, 2004) maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni karena adanya kesepakatan dari musyawarah desa dan memiliki beberapa tujuan. Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah .

2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit-unit usaha desa .
3. Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa .
4. Meningkatkan kreaktifitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah .

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes Jenis usaha yang dapat dijalankan BUMDes yakni:

- a. Bisnis Sosial Merupakan jenis unit usaha yang melakukan pelayanan pada masyarakat desa sehingga masyarakat desa mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit yang sebesar-besarnya. Jenis usaha ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya .
- b. Keuangan/ Banking BUMDes dapat membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Jenis usaha ini bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa .
- c. Bisnis Penyewaan/ Renting Jenis usaha dengan menjalankan penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya .

- d. Lembaga Perantara BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Model usaha ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen
- e. Perdagangan BUMDes menjalankan bentuk usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat desa yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Contohnya dengan mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut .
- f. Usaha Bersama BUMDes dapat membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Contohnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata .
- g. Kontraktor BUMDes dapat menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa .

Hasil dari kesepakatan musyawarah desa tersebut dijadikan acuan dalam mempertimbangkan adanya inisiatif Pemerintahan Desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam desa, sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes, serta pernyataan modal dari pemdes dalam bentuk biaya dan kekayaan desa yang diserahkan dan dikelola sebagian oleh BUMDesnya .

Menurut (Suparji, 2019) Permodalan Badan Usaha Milik Desa bisa didapatkan dari : Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota; Pemerintahan Desa; Investadi laba/keuntungan usaha BUMDes; Bunga bank atau bunga simpanan BUMDes; Tabungan masyarakat ;

Sumber permodalan yang berasal dari pemerintah desa seperti;

- a. Setoran tunai, belanja pembiayaan dari APBDEs yang bersumber penerimaan pemerintah desa di dapat dari hibah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah daerah, atau dari pihak lainnya.
- b. Belanja APDEs dari bantuan keuangan BUMDes
- c. Modal penyertaan barang milik desa yang dimanfaatkan oleh BUMDes.

2.2.3.2 Aspek BUMDes

1. Dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah melalui adanya peraturan desa .
2. Bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diberlakukan pada usaha desa yang dijalankan oleh BUMDes dengan mengikuti peraturan hukum bisnis dan tentunya bukan koperasi .

2.2.3.3 Organisasi Pengelola BUMDes

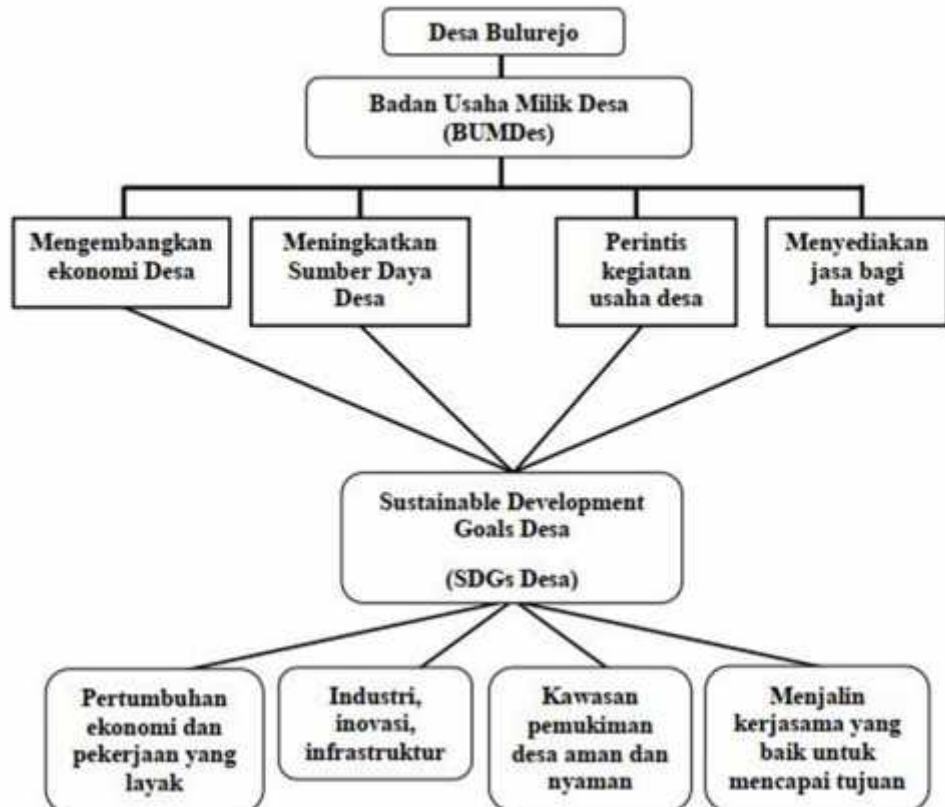
(Suparji, 2019) Organisasi pengelola BUMDes merupakan organisasi yang bersifat tumbuh, artinya organisasi pengelola BUMDes bisa dimulai dari bentuk sederhana saat awal pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam usahanya. Organisasi BUMDes secara umum terdiri dari :

1. Penasehat, adalah Kepala Desa

2. Direksi, merupakan masyarakat setempat yang bertanggungjawab atas aktivitas operasional usaha desa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa
3. Pengelola, adalah unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan tugas dan fungsi, pengelola ditunjuk atas hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Kedudukan anggota BUMDes tidak sama dengan kedudukan anggota koperasi, sehingga anggota BUMDes dapat dikatakan sejajar dengan nasabah pada Bank.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.3
Kerangka Konseptual



Dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya mewujudkan SDGs Desa Bulurejo, program ini dimulai dari pemerintahan desa. Dari 18 tujuan dan target sasaran pedoman SDGs Desa yang paling utama akan diteliti adalah yang menyangkut pertumbuhan ekonomi Desa Bulurejo.